

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BIMA  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan PERMENPAN-RB nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sajikan Laporan ini yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bima baik yang bersifat Administratif maupun Substantif selama tahun anggaran 2018.

Laporan ini menguraikan secara detail mengenai kinerja, koordinasi dan konsolidasi, pengendalian dan konsultasi tugas Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa laporan yang kami sajikan ini masih jauh dari apa yang diharapkan, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin sesuai kemampuan, yang ada baik tenaga maupun sarana penunjang yang terbatas.

Demikian laporan ini kami sampaikan semoga dapat memberikan informasi, evaluasi sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bima, Januari 2019

Kepala Badan,



NIP. 19650602 198903 1 023

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	17
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	18
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	19
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2017	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	22
3.2 Realisasi Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42
4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	41
4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah.....	43

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Bakesbangpol Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bima 2013–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, serta Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Bakesbangpol ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Bakesbangpol selama tahun 2018.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### 1.2.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja badan dan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- b. Melakukan penyediaan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- d. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- e. Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

#### A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta

memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Badan;

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
- b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Badan
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang pada Badan
- e. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- f. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan Badan
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
- h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- i. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala Badan dan semua unit Organisasi di Lingkungan Badan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) sub Bagian yaitu :

### **1. Sub. Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
- c. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi
- d. Penganalisaan hasil pelaksanaan program Badan
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program Badan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

### **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan
- b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung
- c. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran
- d. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran
- e. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor
- f. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
- g. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan
- h. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung
- i. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Sub. Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala.

Sub Bagian Umum mempunyai Tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan Badan
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan Badan

- e. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya
- f. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN**

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas dibidang pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.
- c. Pelaksana anggaran kegiatan Bidang
- d. Penyelenggara urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi ;bidang Kesatuan Bangsa;
- e. Pelaksana Hubungan kerja sama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin mengatur, membina dan mengendalikan serta mengkoordinasikan tugas Bidang;
- b. Menetapkan Visi Misi Bidang untuk mendukung Visi Misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis Bidang sesuai dengan rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis Bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja pada lingkup tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepada Kepala Badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;



- g. Menyiapkan vahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

### **1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa**

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang *Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa* mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sub Bidang *Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa* mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tantang wawasan Kebangsaan dan pembauran bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Pemahaman dan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dan Pendataan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

- l. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- m. Membina, memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktifitas kerja;
- n. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

**2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai tugas :**

- a. Penyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis kegiatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pelaporan kegiatan sub bidang;
- d. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksana anggaran kegiatan Bidang;
- f. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai Rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kewaspadaan nasional dan bela negara;
- e. Melakukan penguatan dan peningkatan Nilai-Nilai Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dilingkup sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- l. Membina, memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- m. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

**C. BIDANG PENGEMBANGAN POLITIK, FASILITASI ORPOL/ORMAS DAN PEMILU**

*Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu*

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksana anggaran kegiatan bidang;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi : Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/Orpol dan Pemilu;
- e. Pelaksana hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya.

*Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu*

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas bidang;
- b. Menetapkan Visi dan Misi Bidang untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja lingkup tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi Bidang sesuai bidang tugasnya;

- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai lingkup tugasnya seperti ijin penelitian, pendaftaran orpol/ormas dan pemilu dan organisasi profesi lainnya;
- h. Menyampaikan pertimbangan teknis dan atau/administrasi kepada kepala badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;
- i. Menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan lingkup tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas kedinasan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- k. Melaksanakan fasilitasi kebijakan pengembangan politik dan fasilitasi ormas/orpol dan pemilu
- l. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan politik dan fasilitasi orpol, ormas dan pemilu;
- m. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat evaluasi pengembangan politik dan fasilitasi orpol, ormas dan Pemilu.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

#### **1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bidang
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap pengembangan pendidikan politik;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;

- e. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- f. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- k. Membina dan memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- m. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan.

## **2. Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu**

Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja sub bidang
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas kader orpol/ormas dan pemilu;

- f. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral;
- l. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan.

**D. BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS DAN PENANGANAN KONFLIK**

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Pengkajian Masalah Strategis Dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksana anggaran kegiatan bidang;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi : Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik;
- e. Pelaksana hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Pengkajian Masalah Strategis Dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas bidang;
- b. Menetapkan Visi dan Misi Bidang untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja lingkup tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi Bidang sesuai bidang tugasnya;
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai lingkup tugasnya;

- h. Menyampaikan pertimbangan teknis dan atau/administrasi kepada kepala badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;
- i. Menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan lingkup tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas kedinasan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- k. Menyiapkan perumusan kebijakan pengkajian masalah strategis;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

### **1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis**

Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :

- a. Penyusun program dan kerja sub bidang;
- b. Penyusunan dan Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan Pengkajian Masalah Strategis;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang bersifat strategis;
- e. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

k. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan

## **2. Sub Bidang Penanganan Konflik**

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas di bidang penanganan konflik;
- b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas / instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik;
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

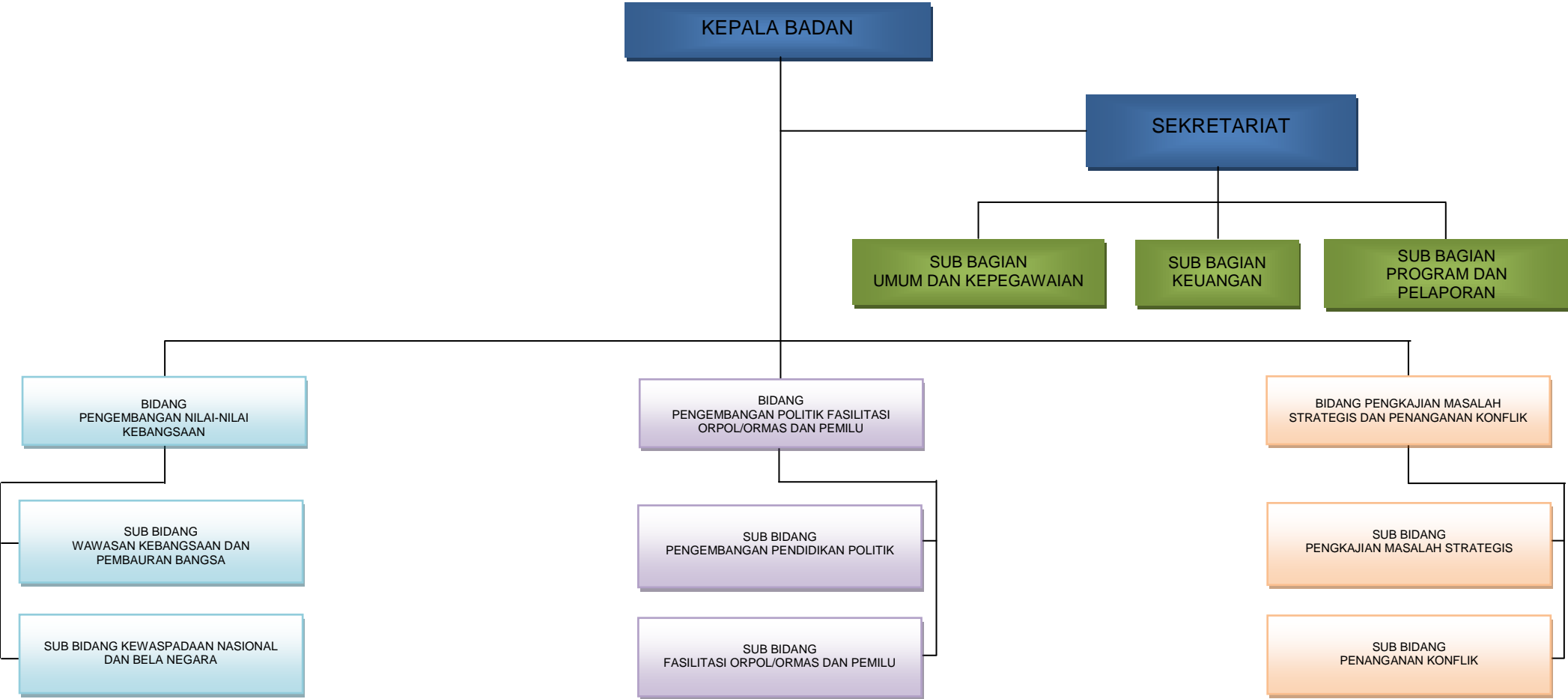
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.



3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan , terdiri dari :
    - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
    - Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
  - b. Bidang Politik,Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik
    - Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu
  - c. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis
    - Sub Bidang Penanganan Konflik

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima



### 1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan keindahan di Kota Bima. Hal ini terjadi disebabkan karena faktor lingkungan, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat Kota Bima yang masih rendah;
- b. Masyarakat Kota Bima mudah di pengaruhi (profokasi);
- c. Bacaan, harian-harian, film jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku – buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawan, penuh dengan kejadian berdarah;
- d. Kurangnya porsi anggaran dana APBD untuk Badan Kesbangpol yang berakibat pada minimnya program prioritas yang dapat di laksanakan karena anggaran APBD sebagian besar digunakan untuk mendukung hal-hal yang bersifat operasional;
- e. Kurangnya Kesadaran lembaga sosial masyarakatan untuk mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota Bima.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis

### A. Visi, Misi, Sasaran dan Strategis Kebijakan

*Visi Badan Politik Kota Bima Kesatuan Bangsa dan adan Kesatuan Bangsa dan politik dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan di masyarakat dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima 2013-2018. Adapun visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:*

---

*” Menciptakan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera”.*

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan;

2. Mendorong terwujudnya ketahanan masyarakat Kota Bima;
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan  
Bakesbangpol Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	70%	72%	76%	78%	81%

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Yg di tangani}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi di Kota Bima}} \times 100\%$

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018.

Tabel 2.3.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	81%

### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada awal tahun 2018 terdiri dari 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 7 (Tujuh) program dengan total anggaran sebesar Rp.3.593.142.303,77,-

Tabel 2.4.

## Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	81%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 92.160.000	APBD
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 290.750.000	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Rp. 486.992.000	APBD
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 692.882.000	APBD



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Pencapaian Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah	Konflik SARA dan Konflik Horizontal	0%	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuannya melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada tahun 2018. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung yaitu :

#### 1. Termonitoringnya Koordinasi Pencegahan Terorisme

Terorisme akan selalu menjadi acaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukan secara serius. Sebagaimana media, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, salah satu upaya mencegah adalah dengan menggelar kegiatan Forum Diskusi, dialog masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang public, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pecegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam upaya pencegahan terorisme dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh seminar dan sebagainya,

dalam hal ini BNPT menjadi partner dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme.

## **2. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Bima**

FKUB memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi secara rutin antar umat beragama. Pada tahun 2018 di laporkan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 10 kali kondisi ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya yaitu 12 kali FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan secretariat bersama serta bantuan dana operasional bagi terlaksananya peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar umat beragama. Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB.

## **3. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bima**

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadi konflik social di masyarakat, sehingga di perlukan upaya yang komprehensif dalam pecegahan, penanganan dan pasca konflik. Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). pada tahun 2018 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melakukan

rapat koordinasi membahas konflik social yang terjadi di Kota Bima sebanyak 12 Kali sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 15 kali mengalami penurunan hal ini menunjukkan konflik social pada tahun 2018 mengalami penurunan

## 2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

---

### Pencapaian Sasaran Strategis

#### Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial

Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Penanganan konflik bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau Pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penangulan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan

terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik sesuai dengan ketentuan meliputi 1 (Satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	81%	81%	100%

Upaya-upaya dalam rangka penyelesaian konflik social di masyarakat yaitu dengan cara di bentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) dan Kominda yang melakukan rapat koordinasi secara intens telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya penyelesaian konflik di Kota Bima dan harus memiliki strategis yang khusus untuk mensiasati potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurunnya konflik Sosial akan mengakibatkan Konduksifitas Daerah yang terjaga. dan Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “Persentase Penyelesaian Konflik Sosial” pada tahun 2018 adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 81 % atau dengan persentase capaian kinerja 100%, dengan perhitungan sbb :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Penyelesaian Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik yg di tangani}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100\% \\
 &= ( 35/43 ) \times 100\% \\
 &= 81 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.3

## Konflik Sosial yang terjadi di Kota Bima

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab
1	26 Februari 2018	Kantor BRI Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh LPPK	Pelayanan Publik BRI yang kurang transparan dan berbelit-belit.
2	05 Maret 2018	Kantor DPRD Kota Bima	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh PMII	Penolakan Undang-Undang MD3
3	05 Maret 2018	Depan Kampus STKIP Bima	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh PMII	Titik Kumpul Demo Penolakan Undang-Undang MD3
4	17 Maret 2018	Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur	Perkelahian antar warga	Cek-Cok Mulut pada saat Orgen tunggal
5	1 April 2018	Jembatan Cinta Kel. Dara Kec. Rasanae Barat	Perkelahian antara Kamp. Sigi dan Kamp. Dara menggunakan Panah	kejadian akibat minuman miras atas nama Fandi dkk warga kel. Paruga melempar rumah sdr Bambang, akhirnya terjadi pelemparan dengan batu dan panah.
6	2 April 2018	Kel. Rabangodu Kec. Raba	Kegiatan audiensi di kantor Dinas Koperidag	Acara audiensi terkait adanya pungli yang dilakukan oleh Dinas Koperidag terhadap para pedagang di Pasar Amahami
7	17 April 2018	Paruga Na'e Convention Hall	Telah terjadi Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode tahun 2018-2023
8	1 Mei 2018	Kel. Sadia Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh Organisasi Komite Perjuangan Rakyat (KPR)	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia
9	2 Mei 2018	Kantor DPRD Kab. Bima, Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh BEM STIE Bima	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia
10	2 Mei 2018	Perempatan Gunung Dua Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh BEM STIE Bima	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia
11	5 Mei 2018	Kel. Monggonao Kec. Mpunda	Telah terjadi Penangkapan Curanmor	Tim OPSNAL (TIM KIA MBOJO) RES BIMA KOTA melakukan Penangkapan pelaku Curanmor berdasarkan laporan polisi nomor : LP/K/165/V/2018/NTB/ RES BIMA KOTA
12	6 Mei 2018	Kel. Rabadompu Timur Kec. Raba	Telah terjadi Pengerusakan kediaman sdr. MUSTAMIN	Pelaku Pengerusakan dilakukan oleh beberapa anggota Keluarga sdr. BETI yang diduga menjadi korban pencabulan oleh sdr. MUSTAMIN

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab
13	7 Mei 2018	SPKT Polres Bima Kota	Pelaporan Oleh Calon Walikota Bima No. Urut 2	Pelaporan dilakukan oleh H.M. LUTFI, SE terkait kasus Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Penghinaan yang dilakukan oleh sdr. RUSLAN H. Usman
14	8 Mei 2018	Paruga Na'e Convention Hall	Telah terjadi Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode tahun 2018-2023
15	14 Mei 2018	Depan Kampus STKIP Bima	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh SMI Cabang Bima	Unjuk Rasa terkait dengan menyampaikan aspirasi dalam melawan kapitalisasi pendidikan dan wujudkan demokratisasi kampus
16	20 Mei 2018	Cabang Empat lampu merah, Kompleks Plaza Pasar Raya Bima Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Terjadi Penggalangan Dana oleh Me-Dan dan JAS Bima	Berlangsung aksi Solidaritas Penggalangan Dana untuk Palestina oleh Forum Medis dan Aksi Kemenangan Indonesia Bersama (Me-Dan) tergabung oleh JAS Bima
17	8 Juni 2018	Kel. Kodo Kec. Rasanae Timur	Telah terjadi Pembacokan	Telah terjadi tindak kriminal Pembacokan yang dilakukan oleh sdr. Hairul terhadap H. Rusli yang menyebabkan tangan bagian kanan terkena senjata tajam
18	11 Juni 2018	Pos Pengaman Serasuba Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Telah terjadi Operasi Kewilayahan dengan sandi KETUPAT GATARING 2018	Telah terjadi Operasi Kewilayahan dengan sandi KETUPAT GATARING 2018 selama 16 hari mulai tanggal 8-23 Juni 2018 dalam rangka ketertiban pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H
19	2 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab
20	4 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS yang bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi KPUD Kota Bima di aula KPUD Kota Bima
21	5 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima dan Kantor Panwaslu Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan/pelanggaran pada proses pemungutan suara pilkada Kota Bima 2018
22	22 Juli 2018	Jembatan Padolo 1 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat	Aksi Unjuk Rasa Oleh Masyarakat Kel. Dara	Aksi Unjuk Rasa Oleh Masyarakat Kel. Dara terkait dengan pembangunan Jembatan Padolo 1 Kota Bima untuk di hentikan sementara karena tidak ada sosialisasi pihak proyek kepada keluarga sekitar jembatan tentang seberapa tinggi, lebar dan panjang jembatan serta papan gambar/denah proyek jembatan
23	11 Juli 2018	Kantor BRI Cabang Bima Lingk. Serasuba kel. Sarae Kec. Rasanae Barat	Aksi Unjuk Rasa dari LPPK (Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi)	Aksi Unjuk Rasa dari LPPK (Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi) sebanyak 15 orang terkait adanya nasabah atas nama sdr. ARMAN yang diduga dibobol uang tabungan sebanyak Rp. 80.000.000 oleh oknum BRI
24	20 Juli 2018	Bandara Sultan Muhammad Salahudin Desa Belo Kec. Palibelo	Penjemputan Jenazah Teroris	Telah terjadi Penjemputan diduga Jenazah Teroris atas nama Yasser warga Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima
25	23 Juli 2018	Depan kantor DPRD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa oleh masa sebanyak 3 orang	Aksi Unjuk Rasa oleh masa sebanyak 3 orang terkait dengan hilangnya uang nasabah BRI
25	24 September 2018	Perempatan Gunung Dua	Aksi Unjuk Rasa dari Organisasi Aliansi Mahasiswa peduli Tani	Aksi unjuk rasa dari Organisasi Aliansi Mahasiswa peduli Tani yang menuntut kesejahteraan petani dengan menaikkan harga bawang, menurunkan harga pupuk dan obat-obat pertanian,

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab
				pengontrolan terhadap harga pupuk dan mengatur standar harga minimum hasil pertanian.
26	24 September 2018	Kantor DPRD Kab. Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Rakyat peduli Tani Kec. Soromandi	Mendesak pemerintah agar menghentikan import bawang merah, standar harga pupuk subsidi dan non subsidi, dan menentukan standar harga obat-obat pertanian
27	1 Oktober 2018	Kantor DPRD Kota Bima Kel. Rabangodu Kec. Raba	Aksi Demontrasi dari Bem STISIP Bima	aksi demontrasi dari bem stisip bima terkait dengan ujaran penghinaan melalui media sosial oleh oknum Anggota Dewan
28	26 Oktober 2018	Aula Kantor Walikota Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Pertemuan antara Walikota Bima Beserta Tokoh Agama Sekota Bima	Membahas adanya aksi pembakaran bendera tauhid di Garut Jawa Barat
29	26 Oktober 2018	Mesjid Raya Al-Muwahidin Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat	Aksi Damai sekitar 1000 Orang dari Ormas Islam Sekota dan Kab. Bima	Aksi Damai dengan cara berkonvoi keliling seputaran jalanan Kota Bima menuju Kantor PC NU Bima dan Polres Bima Kota terkait menyikapi adanya tindakan dari Oknum Banser yang melakukan pembakaran bendera Tauhid di Garut Jawa Barat
30	30 Oktober 2018	Kantor DPRD Kota Bima Kel. Rabangodu Kec. Raba	Aksi Unjuk Rasa sekitar 600 orang dari Forum Honorer Indonesia (K2) Kota Bima	Desakan pengangkatan untuk diakomodir menjadi CPNS tanpa batas usia dan tes, segera lakukan uji publik data K2 Kota Bima, meminta dukungan moril dan finansial dari Bapak Walikota Bima
31	31 Oktober 2018	KM Kartika Express	Kebakaran sebuah Kapal Barang KM Kartika Express milik H. Nasir (60 Tahun) dengan alamat Kec. Sape di Pelabuhan I Kota Bima	Penyebab kebakaran yaitu adanya asap dan api yang berasal dari dek bawah bagian belakang kapal
32	5 November 2018	Kantor Walikota Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa yang di lakukan oleh sekitar 40 orang Mahasiswa dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Penggugat (LMND Lsip IMS Imawer)	Masalah pendidikan ekonomi dan penegakan supremasi hukum (pendidikan gratis perpustakaan berjalan, menghentikan tindakan represif terhadap gerakan Mahasiswa, seret dan adili pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan, dan pemberdayaan pemuda)



No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab
33	9 November 2018	Kendo Kel. Kendo Kec. Raba	Ditemukan Mayat seorang laki-laki yang bernama Wawan Setiawan yang diduga menjadi korban pembunuhan	Perkelahian dan dendam lama antara Korban dan Pelaku
34	19 November 2018	Kantor Dinas pertanian Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa dilakukan oleh 13 Orang yang tergabung dalam Organisasi Lembaga Pengawas Korupsi Bima	Pembagian bibit jagung bagi kelompok tani oleh pihak Ormas GP Ansor dengan adanya penarikan biaya senilai Rp. 250.000-Rp. 400.000 pada Petani
35	19 November 2018	Kantor DPRD Kab. Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa oleh Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) terkait memperingati hari Pelajar Nasional	Lawan kapitalisasi pendidikan, menuntut dicabutnya regulasi yang meliberalisasi sektor pendidikan Indonesia dan menolak regulasi yang menciderai demokrasi rakyat

Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh peran serta aparatur dan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pengkajian masalah strategis dan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi gejala konflik .

Adapun perbandingan capaian dari indikator “Persentase Penyelesaian Konflik Sosial” sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 dimana target Renstra tahun 2018 sebesar 81 % sedangkan capaian sampai saat ini sudah 81 %. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2018 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2018 dapat dicapai.

Pencapaian sasaran strategis tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4  
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	• Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	240.900.000,00
	• Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	84.210.000,00

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
	• Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	161.882.000,00
	• Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	61.570.000,00
	• Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	166.500.000,00
	• Koordinasi forum antar etnis	62.680.000,00
	• Penyuluhan Kepada Masyarakat	94.565.000
	• Pendampingan Penyelesaian Perselisihan partai politik	68.085.000

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk ketiga sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tersebut di atas, maka dapat diperoleh rata-rata kinerja yang diperoleh dari rata-rata akumulasi capaian setiap indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	81%	81%	100%

Pengukuran kinerja tersebut di atas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2018.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

### 3. Capaian Kinerja Eselon III dan IV

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima diukur dari Penetapan Kinerja Eselon III dan IV dapat di Jelaskan Pada Tabel berikut:

Berbagai Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bima tahun 2018 sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan ketertiban yaitu sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase forum masyarakat yang di bina pada tahun 2018 dari target 60% dan yang terealisasi 55%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

a. *Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan Keamanan dan Ketertiban melalui rapat- rapat koordinasi diikuti oleh anggota Kominda dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi. Pada tahun 2018 di lakukan 6 Kali rapat koordinasi.



b. *Kegiatan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menyikapi beberapa insiden yang terjadi di Kota Bima serta menjangkir isu-isu strategis sehingga bisa disusun upaya antisipasi sejak dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas Keamanan dan Ketertiban. Pada tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 4 kali rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)





c. *Kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kota Bima. Konflik tidak boleh di biarkan menjadi liar dan kemudian merusak tatanan kehidupan di masyarakat karena itu seharusnya kita mampu mengendalikan konflik sehingga dapat menjadi kekuatan yang mencerahkan dan bukan kekuatan yang menghancurkan oleh karena itu maka di bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang bertugas meredam potensi konflik sekaligus membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial sebanyak 3 kali.

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar bangsa Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase masyarakat dan aparatur yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan pada tahun 2018 dari target 50% dan yang terealisasi 50%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

a. *Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama.*

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi antar umat beragama, pada tahun 2018 dilakukan 2 kali rapat koordinasi fku.



b. *Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk di Kalangan Tenaga Pendidik dan Siswa SMA/MAN/SMK yang ada di Kota Bima, pada tahun 2018 sebanyak 200 Orang Siswa SMA/MAN/SMK dan 50 Orang tenaga pendidik yang telah mengikuti kegiatan tersebut.



c. *Kegiatan Koordinasi Forum antar Etnis*

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar etnis dengan melakukan rapat koordinasi antar etnis, pada tahun 2018 dilakukan 2 kali rapat koordinasi Forum Antar Etnis.

- Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilkada pada tahun 2018 dari target 70% dan yang terealisasi 70%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

a. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada LSM/Ormas dan yayasan

b. Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi bantuan keuangan dari Pemerintahan Daerah

c. Pendampingan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan kegiatan pendampingan untuk penyelesaian perselisihan partai politik

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

e. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## 3.2. Realisasi Anggaran

### 3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.3.593.142.303,77,- dan terealisasi sebesar Rp.3.416.470.383,00,- atau sebesar 95,08%. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp.1.393.142.303,77,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merealisasikan sebesar Rp.1.294.345.164,00 atau sebesar 92,91%. Adapun belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar

Rp.2.200.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.2.122.125.219,- atau sebesar 96,46%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Belanja BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	1.393.142.303,77,-	1.294.345.164,00,-	92,91
2	Belanja Langsung	2.200.000.000,00,-	2.122.125.219,00,-	96,46
Jumlah		3.593.142.303,77,-	3.416.470.383,00,-	95,08

### 3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	240.900.000,00	237.320.000,00	98,51
		Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	84.210.000,00	77.770.000,00	92,35
		Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	161.882.000,00	158.777.000,00	98,08
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	61.570.000,00	53.810.000,00	87,40
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	166.500.000,00	165.731.000,00	99,54
		Koordinasi forum antar etnis	62.680.000,00	52.570.000,00	83,87
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Penyuluhan Kepada Masyarakat	94.565.000,00	92.138.330,00	97,43
		Pendampingan Penyelesaian Perselisihan partai politik	68.085.000,00	61.265.000,00	89,98
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	239.460.000,00	226.584.400,00	94,62
		Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan	81.222.000,00	78.100.000,00	96,16

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Rekomendasi Bantuan Keuangan			
		Penyelenggaraan Pemilihan Umum	209.550.000,00	209.380.000,00	99,92

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	23.800.000,00	23.520.000,00	98,82
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	9.600.000,00	5.389.600,00	56,14
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	25.500.000,00	23.382.500,00	91,70
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	48.600.000,00	39.600.000,00	81,48
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.290.000,00	9.890.000,00	80,47
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.974.500,00	24.953.000,00	99,91
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	100,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.900.000,00	43.900.000,00	100,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.300.000,00	6.280.000,00	99,68
		Penyediaan makanan dan minuman	4.785.000,00	4.780.000,00	99,99
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	311.359.500,00	311.338.389,00	99,99
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37.132.000,00	36.911.000,00	99,40
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3	Peningkatan Disiplin	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Aparatur	Pengadaan Pakian Olah Raga	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	8.070.000,00	8.070.000,00	100,00
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	59.520.000,00	57.120.000,00	95,97
		Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00

# BAB IV PENUTUP

## 4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2018 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2018.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 91%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 98%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 89% yang terukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100% dan capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 83%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2018 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik.

## 4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana dalam menjaga keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyediaan peraturan daerah tentang Tata Cara Perlindungan masyarakat untuk menjadi dasar implementasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dengan peraturan daerah ini juga akan meningkatkan integrasi dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan masyarakat Kota Bima yang demokrasi, tertib dan tentram.

2. Pemanjapan Tugas Intelijen Daerah yang telah dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta mendorong tumbuhnya kader-kader Intelijen yang mampu melakukan deteksi dini serta dapat mengeliminir setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Intelijen melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
3. Perlu penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NIP. 19650602198903 1 023